

ANALISIS PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
DALAM PEMBIAYAAN BERSAMALAH  
(STUDI PADA KSPPS BMT PERMATA MOJOKERTO)

Nurul Habibah<sup>1</sup>, Mohamad Djasuli<sup>2</sup>

STIE PGRI Dewantara Jombang<sup>1</sup>, Universitas Trunojoyo Madura<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [nurulhabibah@gmail.com](mailto:nurulhabibah@gmail.com), <sup>2</sup> [mdjasuli@gmail.com](mailto:mdjasuli@gmail.com)

**Abstrak.** Dalam bisnis penyaluran dana seperti lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan Konvensional maupun syariah mengalami resiko pembiayaan bermasalah. Dari masalah resiko tersebut perlu dilakukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan. Penelitian ini menganalisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Untuk mengoptimalkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ada beberapa Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan. Beberapa Prinsip Good Corporate Governance menggunakan pendekatan Al-Qur'an, Prinsip Transparansi Q.A at Taubah:119, Akuntabilitas Q.S Al-Ibrahim: 41, Pertanggungjawaban Q.S Al-Isra' 36, Profesional Q.S Asy-syura :38, dan Kewajaran Q.S Asy-Syura :182-183. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat mengguraikan kondisi yang ada dan dapat menganalisis fenomena tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian ini penerapan Good Corporate Governnce dalam pembiayaan bermasalah KSPPS BMT berlandaskan 5 prinsip cukup baik dan strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah adalah membentuk tim dan memperkuat SOP selain itu memaksimalkan peran Marketing Funding.

**Kata Kunci :** Prinsip Good Corporat Governance, KSPPS BMT, Pembiayaan

**Abstract.** *Analysis of the principles good corporate governance in problematic financing (Study on KSPPS BMT Permata Mojokerto). In the business of disbursing funds such as financial institutions both conventional and Islamic financial institution experience the risk of problematic financing. From these risk problems, it is necessary to conduct research to find out how to manage non-performing financing in financial institutions. This study analyzes the application of Good Corporate Governance. To optimize Good Corporate Governance there are several principles that need to be applied. Some principles of Good Corporate Governance using the Qur'an approach, Transparency principle Q.A at Taubah:119, Accountability Q.S Al-Ibrahim: 41, Responsibility Q.S Al-Isra' 36, Professional Q.S Asy-syura :38, and fairness Q.S Asy-Syura :182-183. This study uses qualitative methods by means of interviews, observations, and documentation so that researchers can describe the existing conditions and can analyze the phenomenon. Informants in this study are stakeholders. The result of this study the application of Good Corporate Governance in financing problems at KSPPS BMT based on 5 principles is quite good and the strategy to minimize non performing financing is to form a team and strengthen SOP in addition to maximizing the role of Marketing Funding.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance principles, KSPPS BMT, Financing*

## **Pendahuluan**

Dalam dunia bisnis pernah terjadi krisis ekonomi secara global sekitar Tahun 1997, salah satu penyebab krisis tersebut dikarenakan

lemahnya tata kelola perusahaan atau lembaga, sehingga pada saat itu pelaku bisnis mulai menyadari pentingnya tata kelola perusahaan atau biasa disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam memenangkan persaingan. Sejak saat itu istilah *Good Corporate Governance* kian populer dan ditempatkan pada posisi terhormat.

*Good Corporate Governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mengendalikan suatu struktur pengelolaan perusahaan agar mencapai keseimbangan untuk menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab diantara berbagai partisipan didalam perusahaan termasuk pemegang saham *shareholder* dan *stakeholders*. Menurut Muh Arief Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain *Transparansi (transparency)*, profesional (*profesional*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Salah satu implementasi *Good Corporate Governance* dilakukan dalam lembaga keuangan baik konvensional maupun non konvensional. Penerapan *Corporate Governance* pada lembaga keuangan menjadi sangat penting karena berhubungan dengan dimensi moral yang ada disetiap transaksi komersialnya. Lembaga keuangan syariah harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang baik

sebagai bentuk ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang baik lebih memungkinkan untuk sustainable, bisnis yang seperti itu sangat penting dijaga untuk memenuhi tanggungjawab kepada para stakeholder.

Lembaga keuangan sendiri diketahui sebagai fungsi financing/pembiayaan peran tersebut diharapkan dapat menyediakan modal dalam bentuk kredit. Menurut Slamet (2004) pembiayaan kredit merupakan sumber utama dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pembiayaan sendiri dari tahun ketahun semakin meningkat. Dari *trend* meningkatnya pembiayaan dalam lembaga keuangan tentu ada risikonya yaitu kemacetan dalam pelunasan atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pembiayaan bermasalah karena dari hasil rekap pembiayaan dua tahun terakhir nominalnya cukup besar yang menjadikan laporan likuiditas menurun, Pembiayaan merupakan salah satu produk yang mengalami masalah seperti kredit macet karena biasanya nasabah yang diberikan pembiayaan mengalami masalah dalam melakukan pelunasan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti usaha yang tidak berjalan dan penurunan pemasukan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Good Corporate Governance dalam pembiayaan bermasalah studi pada KSPPS BMT Permata Mojokerto”**.

## **Metode**

Jenis penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum. (Singarimbun, 1989)

Informan penelitian ini adalah KO Landing BMT Mojokerto beserta jajarannya terkait dengan inefisiensi pendanaan yang akan diteliti. Selain itu, informasi dikumpulkan dari anggota keuangan tidak aktif dan data sekunder BMT Mitra Muamalah yang diperlukan, seperti SOP sponsor, notulen rapat, data sponsor tidak aktif untuk tahun 2019-2020 dan laporan lain yang diperlukan terkait dengan masalah non-keuangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Wawancara, Esterberg berpendapat bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna ke dalam suatu topik. (Sugiyono, 2008).
- b. Observasi, Menurut Hariwijaya dan Bisri (2008), observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.
- c. Dokumen, Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen tekstual seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen berupa karya seperti karya seni rupa, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan sejenisnya. Tinjauan pustaka merupakan pelengkap dari penelitian ini (Sugiyono, 2008)

Metode pemrosesan data untuk memeriksa dan memverifikasi keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain untuk membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian (Moleong, 2010). Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berbeda, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan desk assessment. Metode triangulasi ini tidak hanya berfungsi untuk memverifikasi keakuratan data, tetapi juga memperkaya data. Menurut Nasution (2003), triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas interpretasi peneliti terhadap data, karena segitiga bersifat refleksif.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal BMT. Tata kelola perusahaan atau manajemen eksekutif yang baik dilakukan oleh BMT PERMATA Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh karyawan dan mencapai tujuan dari perusahaan dengan visi dan misi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan aspek good corporate governance yang diterapkan pada BMT adalah sebagai berikut:

a. **Transaparansi (Transparency)**

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Corporate Governance yang Islami. Jika sistem perusahaan yang ada dapat memastikan keadilan dan ketidak berpihakan

bagi semua pihak, Perusahaan dapat memiliki informasi yang akurat. Kondisi ini dapat tercapai jika setiap perusahaan menganut etika bisnis Islami dan didukung oleh sistem akuntansi yang baik yang menjamin pengungkapan semua kegiatan bisnis secara adil dan transparan. (Widiyanti, 2009). Menurut perspektif islam sendiri transparansi disebut dengan *misdaqiyah* sebagai firman Allah SWT dalam Q.A at Taubah:119. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hendita berkaitan dengan prinsip transparansi mengatakan bahwa:

“Segala kegiatan di BMT dilakukan dengan penuh transparansi, kita ada IG, FB bahkan youtube semua program kita share melalui media itu. Humas juga membuat brosur yang ada nomor WA-nya biasanya orang-orang akan tanya persyaratan atau minimum pengajuan pembiayaan. BMT sekarang juga sudah punya Aplikasi *BMT Mobile* samean bisa download di Playstore”

a. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan keuangan yang jujur dan adil, tetapi juga mewujudkan hakikat kehidupan manusia, suatu bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah sebagai Alam Pemilik seluruh alam semesta. Dasar-dasar Islam percaya bahwa alam dan segala isinya adalah milik Allah sepenuhnya dan bahwa manusia dipercaya untuk

mengelolanya dengan cara terbaik untuk kebaikan manusia (Widiyanti, 2009). Wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk laporan keuangan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Ibrahim: 41.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hendita, adalah:

“ di BMT semua ada SOP nya, pembagian wewenang dan fungsi untuk menjalankan tugas masing-masing. Dalam pembiayaan sendiri kita ada prosedur penerimaan pembiayaan dan wewenang pemberian pembiayaan. Pembiayaan dibawah 10 juta kita hanya membutuhkan persetujuan dari *teller, marketing* dan *general manager*. Untuk 10 juta ketas kita perlu rapat dan persetujuan dari jajaran pengurus”

b. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya untuk mensejahterakan perkembangan direksi dan pemegang saham, tetapi juga untuk masyarakat sekitar bisnis, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. (Widiyanti, 2009). Lembaga keuangan harus berhati-hati dalam pengambilan

keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggungjawab dalam islam adalah tanggungjawab kepada Allah SWT, tanggungjawab kepada pemilik modal dan tanggungjawab kepada diri sendiri. Q.S Al-Isra' 36.

Dalam waawancaranya Bu Hendita berkata:

“ untuk operasi KSPPS BMT Permata kita berpegang pada Undang-undng Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi. Dalam pembiayaan kita memberikan penjelasan prosedur serta persyaratannya dab berusaha tidak mempersulit proses pembiayaan”

c. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada QS Asy- syura:38. Dalam pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini keputusan stakeholder harus memusyawarahkan dengan masing-masing stakeholder yang berkepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hendita berkaitan dengan prinsip independensi mengatakan bahwa:

“ setiap hari kita melakukan koodinator antar pegawai, dalam pengambilan keputusan biasanya saat rapat komite mengedepankan

musyawarah supaya menghindari kepentingan pribadi. Pelaksanaan musyawarah dilakukan independen tanpa campur tangan pihak lain hanya antar pengurus. Dalam pengambilan keputusan pembiayaan kita juga musyawarah untuk persetujuan pemberian pembiayaan supaya jelas”

d. Kewajaran

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Al Syura :182-183.

“ Aspek kewajaran sudah diterapkan di BMT kita memberikan kesempatan untuk pemberian saran dan kritikan perubahan yang lebih baik. Anggota pembiayaan kita perlakukan sama tidak ada perbedaan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf narasumber, tercatat sebanyak praktik tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan peraturan Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Syariah. Namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kesepakatan tata kelola yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi faktor peningkatan jumlah nasabah. Selain itu, ketika memberikan pinjaman, manajemen BMT tidak menggali lebih dalam tentang karakter pelanggan dan menanyakan

secara jelas tentang agunan yang harus dijamin, oleh karena itu, ketika ada penunggakan BMT sulit untuk mengumpulkan pinjaman uang ini.

## **Pembahasan**

Syakhroza mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai mekanisme tata kelola organisasi yang baik dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis atau efektif dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, independens dan kesetaraan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa penerapan GCG pada BMT Permata Mojokerto sudah diterapkan berdasarkan undang-undang dan pada prinsip-prinsip syariah, semua sudah diterapkan mulai dari prinsip transparan dari segi pengelolaan dana, pelaporan keuangan, nisbah bagi hasil dan terbuka terhadap anggota maupun pengutrus internal.

Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pada BMT dari observasi penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan dapat dilihat dari adanya prosedur pengajuan pembiayaan dalam operasional adanya pembagian fungsi, wewenang dan tanggungjawab dari masing – masing. Dengan adanya tupoksi itu memudahkan pengelola untuk menjalankan tugas masing-masing sesuai description.

Adapun prinsip tanggungjawab KSPPS BMT permata dalam bisnisnya berpegang pada Undang-undang Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi. Dapat dilihat dalam SOP BMT Permata hanya melayani anggota dan calon anggota saja. Pertanggungjawaban setiap

karyawan juga dievaluasi setiap jangka waktu triwulan dengan penilaian kinerja karyawan. Selain tanggungjawab KSPPS BMT Permata juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, bisa dilihat dari *marketing funding* yang harus bisa menganalisa dengan baik apakah anggota tersebut nantinya dalam membayar anggur atau tidak sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Dalam hal ini independensi BMT tidak melakukan musyawarah dengan campur tangan orang lain. Tidak ada kepentingan pribadi dalam hal pengambilan keputusan, musyawarah juga rutin dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengembangan lebih baik lagi dalam pengambilan keputusan.

Untuk prinsip kewajaran sudah diterapkan di BMT. Dalam pelaksanaan perlu dibangun hubungan kerjasama yang baik dan sehat di tempat kerja agar memotivasi pengurus untuk bekerja dengan tekun. Demi keadilan, anggota diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun. BMT juga memberikan kesempatan kepada anggota jika ada yang menyampaikan kritik dan saran serta pengaduan dari anggota. Dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang telah dijelaskan diatas prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen pebiayaan pada KSPPS BMT Permata sudah terlaksana dengan baik. Aapun penerapan prinsip Good Corporate

Governance pada BMT Mojokerto yaitu: *Pertama*, Prinsip Transparansi dengan menggunakan pendekatan Q.S at taubah :119 dalam implementasinya prinsip tansparansi telah terlaksana dengan baik, keterbukaan dalam informasi mengenai kegiatan pembiayaan dengan mudah diakses dan cepat. *Kedua*, Prinsip Akuntabilitas dengan menggunakan pendekatan Q.S Al Ibrahim :41 dalam penerapaknya prinsip akuntabilitas sudah terlaksanan dengan baik, dalam operasinya staff BMT sudah memiliki tupoksi dalam tugasnya sehinga wewenang sudah sangat jelas. *Ketiga*, Prinsip Pertanggungjawaban dengan pendekatan Q.S Al-Isra' :36 dalam implementasinya sudah sangat baik, dilihat dengan kepatuhan BMT yang berpegang pada Undang-undang Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dalam bisnisnya. *Keempat*, Prinsip Independensi dengan pendekatan

Q.S Asy-syura : 38 dalam implementasinya prinsip Independensi baik, dilihat dari cara pengambilan keputusan yang tidak ada campur tangan pihak luar. *Kelima*, Prinsip kewajaran dengan pendekatan Q.S Asy-syura :182-183 dalam implementasinya prinsip kewajaran sangat baik, BMT memberi kesempatan untuk anggota menyampaikan saran dan kritik, tidak ada deskriminasi dalam tugas dan juga BMT memberikan pelayanan dengan baik.

### Daftar Rujukan

- Anwar Aan Z., R. L. (22018). Analisis Manajemen Pembiayaan Macet Studi BMT Mitra Muamalah Jepara. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 7-12.

- Effendi, M. A. (2009). *The Power of Good Corporate Governace: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaban, A. M. (2017). Analisis Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance pada Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 1-16.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Mningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*.Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Widiyawati, N. W. (2009). Good Corporate Governance dalam pandangan islam. *Jurnal Akuntansi Uneversitas Jember*, 7(2): 104-111.